

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berasaskan temuan hasil penelitian menggunakan regresi data panel dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia”** mencakup data keuangan Tahun Anggaran 2020 – 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu berperan sebagaimana mestinya sebagai sumber pendanaan utama dalam pendapatan daerah, sehingga turut menghambat kinerja keuangan terutama dalam hal efisiensi pengelolaan anggaran guna mendukung pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Oleh karena itu PAD tidak cukup representatif untuk mencerminkan kondisi aktual atas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah.
2. Dana Perimbangan belum dikelola dengan optimal yang mengakibatkan dominasi dalam penerimaan pendapatan daerah. Hal tersebut cenderung membuat daerah menjadi pasif dalam menggali potensi lokal karena memiliki ketergantungan tinggi akan dana transfer pusat, sehingga jika terjadi peningkatan dari nominal Dana Perimbangan dapat membuat kinerja keuangan semakin menurun.

3. Belanja Modal telah dikelola dengan baik sehingga dapat berperan dalam mendorong peningkatan daerah dan mampu merepresentasikan kinerja daerah dalam mengelola anggaran secara efisien tanpa memberikan tekanan yang berlebih pada penerimaan yang telah tersedia.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih belum berperan sebagaimana mestinya dalam cadangan anggaran, karena kontribusinya dalam menutupi defisit belanja daerah masih sangat rendah. Dengan demikian, SiLPA tidak cukup representatif untuk mencerminkan kondisi aktual atas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah.
5. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara bersama-sama bisa berdampak akan kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya jika ditinjau melalui rasio efisiensi daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian berikut yakni memanfaatkan empat variabel utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta hanya memakai rasio efisiensi dalam menganalisis periode penelitian yakni dari tahun 2020 hingga 2023. Sehingga hasil analisis mungkin belum sepenuhnya mampu merepresentasikan tren jangka panjang atau dinamika keuangan daerah khususnya tingkat provinsi di Indonesia secara lebih komprehensif.

5.3 Implikasi Penelitian

Merujuk pada hasil studi diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu berperan sebagaimana mestinya sebagai sumber pendanaan utama dalam pendapatan daerah, sehingga turut menghambat kinerja keuangan terutama dalam hal efisiensi pengelolaan anggaran guna mendukung pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Oleh karena itu PAD tidak cukup representatif untuk mencerminkan kondisi aktual atas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai agen perlu mengevaluasi kembali strategi pengelolaan dan pengoptimalan PAD agar tidak sekadar menjadi sumber pendapatan yang pasif, melainkan dapat dikembangkan guna mendukung program yang lebih produktif dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat selaku principal.

Hasil studi mengenai Dana Perimbangan menunjukkan belum adanya pengelolaan optimal yang menyebabkan dominasi dalam penerimaan pendapatan daerah. Hal tersebut cenderung membuat daerah menjadi pasif dalam menggali potensi lokal karena memiliki ketergantungan tinggi akan dana transfer pusat, sehingga jika terjadi peningkatan dari nominal Dana Perimbangan dapat membuat kinerja keuangan semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah sebagai agen perlu melakukan perbaikan perencanaan, penyaluran, dan pengelolaan dana perimbangan secara lebih optimal dan efisien.

Hasil studi mengenai Belanja Modal menunjukkan bahwa telah dikelola dengan baik sehingga dapat berperan dalam mendorong

peningkatan daerah dan mampu merepresentasikan kinerja daerah dalam mengelola anggaran secara efisien tanpa memberikan tekanan yang berlebih pada penerimaan yang telah tersedia. Hasil tersebut juga menyiratkan bahwa pengeluaran yang dialokasikan untuk aset tetap dan pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi keuangan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah selaku agen perlu memprioritaskan belanja modal dalam alokasi anggaran dengan pengawasan dan evaluasi guna mengoptimalkan masa manfaat dari aset tersebut.

Hasil studi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menunjukkan bahwa masih belum berperan sebagaimana mestinya dalam cadangan anggaran, karena kontribusinya dalam menutupi defisit belanja daerah masih sangat rendah. Dengan demikian, SiLPA tidak cukup representatif untuk mencerminkan kondisi aktual atas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah selaku agen perlu mengevaluasi perencanaan dan pemanfaatan SiLPA agar dapat berfungsi optimal sebagai cadangan yang efektif guna menutup defisit belanja serta meningkatkan fleksibilitas keuangan daerah dalam menghadapi kebutuhan yang tak terduga.

Hasil dari studi pada variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SiLPA secara bersamaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya jika ditinjau melalui rasio efisiensi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD sebagai sumber pendapatan

daerah dapat mengurangi ketergantungan dana yang mayoritas berasal dari pusat, salah satunya Dana Perimbangan. Penggunaan PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola secara tepat dan efisien untuk optimalisasi daerah seperti pembangunan infrastruktur ataupun pengeluaran lain yang bersifat produktif dalam Belanja Modal, dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam menstabilkan pendapatan dengan belanja daerah dalam suatu tahun anggaran, dapat menggunakan dana sisa lebih dari tahun sebelumnya guna menutupi defisit pada tahun berjalan agar membantu pengelolaan keuangan untuk tetap efektif dan efisien. Sehingga, pemerintah daerah sebagai agen perlu mengelola keempat variabel tersebut secara terpadu dan strategis guna meningkatkan efisiensi kinerja keuangan daerah dengan baik.

5.4 Saran

5.4.1 Bagi Pemerintah Provinsi Daerah di Indonesia

Pemerintah provinsi daerah diharapkan mampu meningkatkan peran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan belanja daerah. Upaya tersebut dapat direalisasikan melalui maksimalisasi sumber pendapatan lokal dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan adanya optimalisasi sumber pendapatan daerah diharapkan dapat menurunkan taraf ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, salah satunya dana perimbangan. Selain itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa belanja daerah khususnya belanja modal yang telah

dialokasikan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat melalui perencanaan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

5.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kedepannya para peneliti akan menggunakan metrik tambahan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Selain itu, periode penelitian dapat diperluas dan penambahan variable lain yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, maupun ukuran pemerintah daerah guna mampu merepresentasikan tren jangka panjang atau dinamika keuangan daerah khususnya tingkat provinsi di Indonesia secara lebih komprehensif.